



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Agama Sukabumi
Tahun 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Sukabumi dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi Yang Agung”

dengan Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK	99%	99%	99%	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	20	20	20	25
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	3%	3%	5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui <i>e-Court</i>	3 %	3 %	5 %	4 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara eksekusi	a. Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya penataan arsip perkara	a. Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009 (1976-2009)	5%	5%	5%	5%
		b. Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan / Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 - 2020	5%	5%	5%	5%
		c. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan mulai tahun 2010-2020	5%	5%	5%	5%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pembentukan Tim E-Court	v				Tim Kerja	1. Program Persidangan elektronik 2. Program Transparansi dan Informasi Peradilan 3. Oneday publish dan oneday minutasi	1. Monev percepatan penyelesaian perkara	237.500.000
	Monev secara berkala	v	v	v	v	Laporan Monev		2. Persidangan e-court, litigasi dan persidangan penyelesaian perkara	
	Pembentukan Tim Transparansi dan Informasi	v				Tim Kerja		3. Membangun komunikasi percepatan panggilan delegasi	
	Pembentukan TIM SKM	v				Tim SKM		4. Survey Kepuasan Masyarakat	
	Monev Template Dokumen	v	v	v	v	Template standar			

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
2.	Koordinasi panggilan/ pemberitahuan delegasi	v	v	v	v	Relaas delegasi	Optimalisasi SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyediaan Salinan Putusan	1. Monitoring penyelesaian salinan putusan sesuai dengan jenis perkara, melalui aktivasi peran media IT	
	Pemantapan rencana kinerja (rapat kerja / evaluasi/ crooschek)	v	v	v	v	Dokumen perencanaan	Oneday service	2. Standar Layanan Pemberitahuan Isi Putusan melalui pemanfaatan SMS Gateway	
	Monev SOP		v		v	Laporan Monev	Optimalisasi SOP Layanan	3. Penerapan SOP (standar operasional prosedur)	
	Rekapitulasi dan kajian pelaksanaan Mediasi	v	v	v	v	Dokumen Analisa pelaksanaan Mediasi	Optimalisasi pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi	4. Membuat rekapitulasi pelaksanaan mediasi dan keberhasilan perdamaian oleh Majelis Hakim	
3.	Penerbitan SK Panjar	V				SK Panjar Biaya Perkara	Program Access for Justice	Membuat Penetapan Pelaksanaan Akses untuk layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Sukabumi	
	Standar Layanan Prodeo	v				Standar	Program Access for Justice	Koordinasi pihak terkait	24.000.000

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
						Layanan Prodeo		layanan terpadu (Implementasi Perma 1 Tahun 2015)	
	Penyelesaian perkara identitas hukum	v	v	v	v	Penetapan Isbat	Melakukan pengkajian data (pemetaan) atas wilayah masyarakat miskin dan belum memiliki identitas hukum perkawinan, dengan membuat rekapitulasi data secara berkala	Koordinasi pihak terkait layanan terpadu (Implementasi Perma 1 Tahun 2015)	24.000.000
	Pemberian bantuan advis hukum dan pembuatan gugatan / permohonan	v	v	v	v	Advis hukum dan surat gugatan/ permohonan	Program Peningkatan peran pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan	35.000.000
	Rapat kerja Kepaniteraan dan Pengelola keuangan	v		v		Dokumen hasil rapat kerja	Optimalisasi peran Tim Pengelola Keuangan	Koordinasi pelaksanaan anggaran manajemen peradilan bagi masyarakat terpinggirkan	30.000.000
4.	Pembentukan hakim pengawas bidang eksekusi	v				SK Hakim Pengawas Eksekusi	Koordinasi Forkompimda	Rapat koordinasi	
	Monev SOP Eksekusi		v		v	Laporan hasil Monev	Monev SOP Eksekusi	Kajian dan evaluasi SOP terkaitan pelaksanaan	

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
								Eksekusi	
	Koordinasi Tim Eksekusi	v	v	v	v	Laporan hasil koordinasi	Optimalisasi dan konsolidasi Tim Kerja	Rapat dan Diskusi persiapan dan pelaksanaan eksekusi	
5.	Pembentukan Tim Retensi Arsip berkas perkara	v				SK Tim	Retensi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Tim Kerja - Penyusunan Perencanaan Retensi Arsip Berkas Perkara 	
	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Tim	v	v	v	v	Laporan Pelaksanaan	Monev Pelaksanaan Retensi Arsip Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilahan / Klasifikasi - Pengelompokan dokumen - Penginputan pada data base atau pada aplikasi SIPP - Penjilidan 	



Sukabumi, Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

(Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.)

SASARAN I:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator:

1. Persentase perkara tunggakan yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase turunnya sisa perkara
4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK

Dengan kebijakan, sebagai berikut:

Kebijakannya adalah:

4. Program Persidangan elektronik
5. Oneday minutate
6. Oneday publish
7. Kajian dan Diskusi
8. Tim SKM
9. Program Transparansi dan Informasi Peradilan
 - ❖ Strateginya adalah :
 - Evaluasi dan monitoring tunggakan perkara secara berkala (setiap bulan), termasuk menyusun peta permasalahannya.
 - Monitoring dan evaluasi percepatan penyelesaian perkara setiap bulan.
 - Pembentukan Tim *e-Court*.
 - Optimalisasi case manajemen.
 - Optimalisasi kinerja layanan perkara, melalui peran supporting unit satuan kerja
 - Mengupayakan membangun sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) berbasis Teknologi Informasi.
 - Membangun komunikasi percepatan tabayun (panggilan/pemberitahuan delegasi) dengan melakukan koordinasi satker yang terkait
 - Pemantapan rencana kinerja (rapat kerja/evaluasi/crooschek)
 - Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Pimpinan.
 - Optimalisasi penerapan template SIPP mulai dari Meja 1 sampai dengan Majelis Hakim.
 - Melakukan kajian atau diskusi tentang hukum formil dan materil serta manajemen keperkaraan secara berkala

- Pembentukan Tim IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).
- Membangun wilayah Zona Integritas
- Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan pelaksanaan penyusunan dokumen Zona Integritas
- Membentuk Tim Implementasi Transparansi dan Informasi Peradilan melalui media website
- Monitoring dan evaluasi media website
- Sosialisasi layanan peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu
- Monitoring dan evaluasi implementasi SIPP secara berkala
- Optimalisasi peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN II:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator:

1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu
4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Dengan kebijakan, sebagai berikut:

Kebijakannya adalah:

1. Optimalisasi SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyediaan Salinan Putusan
2. Oneday service
3. Oneday minutate
4. Oneday publish
5. Optimalisasi pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016
 - ❖ Strateginya adalah:
 - Pembentukan Tim *e-Court*.
 - Optimalisasi case manajemen termasuk perencanaan target pendaftaran melalui e-court dan persidangan elektronik (e-Litigasi)
 - Implementasi Perma Nomor 3 tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019
 - Optimalisasi kinerja layanan perkara, melalui peran supporting unit satuan kerja

- Mengupayakan membangun sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) berbasis Teknologi Informasi.
- Monitoring durasi penyediaan salinan putusan sesuai dengan jenis perkara, melalui aktivasi peran media IT
- Monitoring dan evaluasi program oneday minutate/ oneday publish
- Membuat rekapitulasi pelaksanaan mediasi dan keberhasilan perdamaian oleh Majelis Hakim
- Membuat Standar Layanan Pemberitahuan Isi Putusan melalui pemanfaatan *SMS Gateway*
- Pemantapan rencana kinerja (rapat kerja / evaluasi/ crooschek)
- Penerapan SOP (standar operasional prosedur)
- Membuat rekapulasi proses pelaksanaan layanan upaya hukum secara berkala, dan peta permasalahan
- Membuat rekapitulasi perkara ekonomi syariah

SASARAN III:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan indikator:

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
2. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dengan kebijakan, sebagai berikut:

- Optmalisasi Program Aceso for Justice dengan skala prioritas dan koordinasi dengan Instansi terkait sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 183/77/SJ tanggal 4 Januari 2019 perihal Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pengadilan.
- Kebijakan : Penetapan Pelaksanaan Akses untuk layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Sukabumi
 - ❖ Strateginya adalah :
 - Membuat standar layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
 - Membuat standar pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

- Koordinasi pihak terkait layanan terpadu (Implementasi Perma 1 Tahun 2015)
- Ikut berperan dalam penyuluhan hukum di Forkompimda Kota Sukabumi
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan.
- Sosialisasi adanya pemberian biaya Cuma-Cuma bagi masyarakat yang kurang mampu.
- Optimalisasi petugas meja I dan petugas meja informasi.
- Optimalisasi peran Tim Pengelola Keuangan.
- Meningkatkan peran pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Melakukan pengkajian data (pemetaan) atas wilayah masyarakat miskin dan belum memiliki identitas hukum perkawinan, dengan membuat rekapitulasi data secara berkala.
- Melakukan survei berdasarkan validasi data kemiskinan.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kota Sukabumi terkait legalisasi hukum perkawinan dan perkawinan dibawah umur

SASARAN IV:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator:

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dengan kebijakan, sebagai berikut:

- **Kebijakannya** adalah Koordinasi dengan instansi terkait terutama dengan pihak pengamanan.

Strateginya adalah :

- Melakukan kajian mengenai permasalahan dalam objek sengketa
- Pembentukan hakim pengawas bidang eksekusi
- Penerapan SOP permohonan eksekusi dan evaluasinya
- Kerjasama dengan pihak Kepolisian

SASARAN V:

Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara eksekusi, dengan indikator:

- Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Kebijakannya adalah Koordinasi dan Konsolidasi Tim Pengadilan Agama Sukabumi yang langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.

Strateginya adalah :

- Melakukan kajian mengenai permasalahan dalam objek sengketa
- Penerapan SOP permohonan eksekusi dan evaluasinya
- Pemetaan permasalahan berkas permohonan

SASARAN VI:

Terlaksananya penataan arsip perkara, dengan indikator:

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terlaksananya penataan arsip perkara, ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009
- Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan/ Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 – 2020
- Persentase arsip perkara yang dialih mediakan mulai tahun 2010-2020

Kebijakannya adalah Program Retensi Arsip Perkara.

Strateginya adalah :

- Pembentukan Tim Kerja Retensi Arsip
- Penyusunan Perencanaan Retensi Arsip
- Penyusunan Perencanaan Arsip berbasis digital
- Pembangunan aplikasi arsip digital
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan retensi arsip.